

## ADVOKASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG

Wahyu Nurharyati<sup>1</sup>, A.Nelson Aritonang<sup>2</sup>, dan Aribowo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan Selatan

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

E-mail: wahyu.balaipd@gmail.com

### Abstract

*This research aims to develop and to arrange advocacy programs for women's empowerment of poor families in Desa Cimenyan. The research method used is qualitative method, with Action Research Design. Data obtained through documentation study, direct observation, in-depth interviews, focus group discussion (FGD). The validity of the data is done by using triangulation technique (checking data through different source, technique and time). A review of the early models of women's empowerment programs for poor families shows that the lack of support and attention from the local government towards the poor women's empowerment program has been implemented in RW 07 Desa Cimenyan, hence it is necessary to advocate the empowerment of poor families program in order to obtain formal legality support from local government. Program advocacy activities consist of planning, implementation and improvement of the program. Program advocacy held through audiences and public hearings, lobbying and networking with local sponsors and mass media. The result of this research is the creation of support from the village government toward the empowerment program of poor family women with the issuance of Decision Letter and Business Certificate. The result of this research is the creation of support from the local government toward the women empowerment program of poor family with the publicity of Decision Letter and Business Certificate. The expected outcome is the empowerment program of poor women is used as a model in empowering women for other groups in Desa Cimenyan.*

*Keywords: government support, program advocacy, women independetly*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menyusun advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan *Desain Action Research*. Data diperoleh dari studi dokumentasi, observasi partisipasi, wawancara mendalam, diskusi terfokus (FGD). Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi (melalui sumber, teknik, dan waktu yang berbeda). Review terhadap model awal program pemberdayaan perempuan keluarga miskin menunjukkan bahwa belum maksimalnya dukungan dan perhatian dari pemerintah desa terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yang telah dilakukan di RW07 Desa Cimenyan, sehingga diperlukan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin berupa perencanaan, pelaksanaan, dan penyempurnaan program agar mendapatkan dukungan berupa legalitas formal dari pemerintah desa. Advokasi program dilakukan melalui audiensi dan *public hearing*, lobbying serta jejaring dengan pihak sponsor dan media massa lokal. Hasil dari penelitian adalah terciptanya dukungan dari pemerintah desa terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dengan diterbitkannya Surat Keputusan dan Surat Keterangan Usaha. Hasil akhir yang diharapkan adalah program pemberdayaan perempuan keluarga miskin ini dijadikan model dalam pemberdayaan perempuan pada kelompok lainnya.

Kata kunci: advokasi program, dukungan pemerintah, kemandirian perempuan

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang strategis karena dianggap sentral dan mengakibatkan masalah-masalah sosial lainnya, seperti keterlantaran, kejahatan, kebodohan, dan sebagainya. Kemiskinan akan selalu menjadi topik yang diperdebatkan di berbagai forum nasional maupun internasional, karena secara global telah ada kesepakatan untuk membangun dunia dengan memerangi kemiskinan demi menciptakan perdamaian dunia.

Selama ini kemiskinan lebih sering dikaitkan dengan dimensi ekonomi karena dimensi inilah yang paling mudah diamati, diukur, dan diperbandingkan. Padahal kemiskinan berkaitan juga dengan berbagai dimensi, yaitu dimensi sosial, budaya, politik, dan kesehatan. Ellis dalam Suharto (2005) menyatakan bahwa: "Dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat sebagai akses terhadap kekuasaan (*power*). Kemiskinan secara sosial-psikologi menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas". Dimensi secara kesehatan, berbagai macam penyakit mengancam mereka akibat lemahnya daya resistensi dan imunitas yang merupakan akibat rendahnya status gizi (Hardinsyah, 2007).

Pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal umumnya adalah dengan menerapkan pendekatan ekonomi semata, yang seringkali kurang mengabaikan peran kebudayaan dan konteks lokal masyarakat. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan kekurangan pendapatan. Sangat terlihat pula di

berbagai program yang dilaksanakan pemerintah umumnya hanya berusaha memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi, dan semacamnya. Kendati secara harfiah nama berbagai program pengentasan kemiskinan berbeda-beda, tetapi substansinya sesungguhnya hampir sama, yaitu memberikan aliran modal kepada masyarakat miskin dan meminta mereka bekerja lebih keras untuk memberdayakan dirinya sendiri (Suyanto, 2008).

Senada dengan pernyataan di atas, berbagai upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan telah banyak dilakukan, namun upaya tersebut tidak mampu meredam meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016, menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 28,01 juta jiwa atau 10,86% dari total jumlah penduduk Indonesia dibandingkan bulan Maret 2015 yaitu sebesar 28,59 juta orang (11,22%). Penduduk miskin di perkotaan sebesar 10,65 juta jiwa dan penduduk miskin di pedesaan sebanyak 17,94 juta jiwa. Sementara penduduk miskin di Jawa Barat pada bulan Maret 2016 terdapat sebesar 4.224.325 jiwa atau 8,95% dari total jumlah penduduk Jawa Barat. Penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 2.497.592 orang (7,67%) terhadap jumlah penduduk perkotaan) sedangkan di daerah pedesaan sebanyak 1.726.733 orang (11,80%) terhadap jumlah penduduk pedesaan). Dalam skala nasional maupun regional menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan lebih besar daripada penduduk miskin di perkotaan.

Desa Cimenyan merupakan salah satu desa yang tingkat kemiskinannya masih tergolong tinggi. Data dari profil Desa Cimenyan jumlah keluarga miskin di Desa Cimenyan sebanyak 20% dari 4.057 KK atau sebesar 811 KK, atau sekitar 2.627 jiwa, sedangkan di wilayah RW 07 Desa Cimenyan terdapat 63 KK atau 46,67% keluarga miskin. Pada umumnya kepala keluarga miskin yang terdapat di RW 07 Desa Cimenyan bekerja di sektor informal.

Mereka mempunyai penghasilan yang rendah karena bekerja sebagai buruh harian lepas.

Kemiskinan di Desa Cimenyan bersifat struktural, hal ini disebabkan adanya upaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Dalam teori sosialis kolektivisme dinyatakan bahwa inti atau penyebab suatu permasalahan bukan pada individu atau kelompok melainkan ada pada struktur sosial pembentuk kesatuan itu sendiri.

Berdasarkan studi di lapangan ditemukan beberapa hal yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan program tersebut, seperti adanya penerima manfaat yang seharusnya tidak berhak namun mendapatkan bantuan, sehingga terjadi kecemburuan dengan yang seharusnya berhak menerima. Kesenjangan antara kelompok perempuan keluarga miskin dengan aparat pemerintah Desa Cimenyan sebagai penghubung mereka kepada sumber kebutuhan akan mempengaruhi pula dampak kemiskinan. Kurangnya sosialisasi pemerintah desa dalam menginformasikan serta merangkul warganya maka semakin tidak tahu kelompok perempuan keluarga miskin terhadap layanan dari program pemerintah. Informasi terkait ketersediaan program-program pemberdayaan perempuan keluarga miskin perlu disampaikan kepada mereka sebagai tawaran perubahan kualitas hidup yang menjanjikan.

Hasil dari awal penelitian di RW 07 Desa Cimenyan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan keluarga miskin, meliputi *setting* mikro, mezo dan makro. Pada tahap asesmen, diketahui bahwa kondisi kemiskinan yang dialami oleh perempuan keluarga miskin RW 07 adalah dalam bentuk: 1) Penghasilan rendah; sebagian perempuan

keluarga miskin ada yang bekerja sebagai buruh setrika dan pedagang kecil yang rata-rata tiap bulannya hanya mendapatkan upah atau penghasilan sebesar Rp.1.200.000, jauh dari UMR Kabupaten Bandung yakni sebesar Rp.2.275.715; 2) Tidak memiliki tabungan; dan 3) Tidak mempunyai keterampilan yang bisa menunjang perekonomian mereka; mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pelatihan yang disebabkan setiap ada pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, yang diikutsertakan hanya yang berusia di bawah 27 tahun.

Perempuan keluarga miskin merupakan kelompok rentan yang harus segera ditangani melalui intervensi pekerja sosial. Layanan pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha merupakan salah satu cara untuk membekali mereka dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pekerja sosial melakukan jejaring dan atau kemitraan dengan berbagai pihak terkait bisa dari unsur pemerintah maupun swasta dalam melakukan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha tersebut.

Pada model awal dilakukan pemberdayaan individu-individu yang memiliki persoalan beraneka ragam. Persoalan yang dihadapi individu-individu khususnya perempuan keluarga miskin masih bersifat internal. Seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya motivasi dan semangat untuk memperbaiki kondisi keluarga, tidak mempunyai modal usaha dan adanya sifat pasrah terhadap keadaan. Adapun pendekatan yang sudah dilakukan melalui konseling, pendampingan, dan dukungan keluarga. Namun kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah internal akan tetapi juga masalah eksternal. Yakni ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, terbatasnya sistem sumber keuangan yang bisa diakses dan minimnya sarana dan prasarana usaha yang dimiliki. Berbagai upaya yang dilakukan

secara mezo dan makro adalah dengan melakukan intervensi yang diarahkan pada kelompok maupun masyarakat dalam menguatkan aspek struktural atau eksternal dari individu khususnya dalam hal ini perempuan keluarga miskin. Kegiatan intervensi yang sudah dilakukan meliputi pendampingan motivasi bagi perempuan keluarga miskin, pemberian pelatihan pembuatan dodol peuyeum dan administrasi keuangan sederhana secara kelompok, pemberian pengetahuan cara pembuatan proposal, melakukan jejaring atau kemitraan dengan unsur-unsur yang terkait seperti Café & Resto Bareto dengan hasil adanya kerjasama dalam promosi hasil produk kelompok perempuan keluarga miskin, Kampung Bamboo dengan hasil diberikannya tempat usaha bagi kelompok perempuan keluarga miskin untuk memasarkan produk, pemasaran hasil produk kelompok perempuan keluarga miskin ke toko oleh-oleh di wilayah Pasteur Bandung. Membentuk warung sembako dengan bekerja sama dengan para pemilik usaha di bidang beras dan peternakan ayam. Dan melakukan kerjasama dengan lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dengan hasil adanya kerja sama dalam program pemberdayaan perempuan keluarga miskin.

Persoalan yang kemudian muncul adalah belum adanya dukungan atau upaya terstruktur untuk menjadikan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin sebagai model untuk diterapkan oleh pemerintah lokal dalam pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk mengadvokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin sebagai model dalam pemberdayaan kelompok lainnya di Desa Cimenyan. Sehingga diharapkan adanya model pemberdayaan perempuan keluarga miskin yang bisa meningkatkan kesejahteraan perempuan keluarga miskin dan bisa dijadikan sebagai model dalam pemberdayaan kelompok perempuan miskin di wilayah lainnya. Selain itu program pemberdayaan perempuan keluarga miskin ini masuk ke dalam anggaran

pembangunan desa, adanya anggaran khusus untuk program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dan berlangsung secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian “Bagaimanakah advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Cimenyan.” Selanjutnya, berdasarkan langkah-langkah penelitian *action research* penelitian ini difokuskan pada: 1) Bagaimanakah *review* program atau model yang diterapkan pada pemberdayaan perempuan keluarga miskin di RW 07 Desa Cimenyan. 2) Bagaimanakah rencana model advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. 3) Bagaimanakah implementasi advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan. 4) Bagaimanakah penyempurnaan advokasi dalam pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan.

Definisi pekerjaan sosial menurut *International Federation of Social Workers* (IFSW) dan *International Association of School of Social Work* (IASSW) Tahun 2014 di Melbourne merilis definisi global pekerjaan sosial:

*“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.”*

Pengertian advokasi dalam pekerjaan sosial menurut Barker dalam Raharjo (2014:168):

*“act of directly representing or defending others; in social work championing the rights of individuals or communities through direct intervention or through empowerment. According to the NASW Code of Ethics, it is a basic obligation of the profession and it’s members”.*

“Advokasi sebagai tindakan langsung mewakili atau membela orang lain. Dalam pekerjaan sosial memperjuangkan hak-hak individu atau masyarakat dengan intervensi langsung melalui pemberdayaan. Hal tersebut sesuai dengan Kode Etik NASW sebagai kewajiban dasar profesi dan para anggotanya.”

Sedangkan menurut Blakely, 1991 tentang advokasi pekerja sosial yaitu:

“..... *but in order for social workers to evaluate their work as advocates, they must understand what is meant by the term. Advocacy is associated with exciting changes that benefit vulnerable groups. Although the profession of social work has long been associated with advocacy*”

“Agar pekerja sosial dapat mengevaluasi pekerjaan mereka sebagai advokat, mereka harus memahami apa yang dimaksud dengan istilah/term. Advokasi terkait dengan perubahan mendasar yang membela kepentingan kelompok-kelompok rentan. Meskipun profesi pekerjaan sosial telah lama dikaitkan dengan advokasi.”

Komponen-komponen dalam advokasi pekerjaan sosial menurut Adi Fahrudin dalam Naskah Akhir Advokasi, 2016, yaitu a) Eksklusif (*exclusive*). Tema ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara klien dan advokat yang menunjukkan hubungan tersebut hubungan tunggal, unik, terfokus kepada klien, tanggung jawab utama kepada klien, dan berpusatkan kepada kebutuhan manusia; b) Timbal Balik (*mutual*). Tema ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara klien dan advokat sebagai hubungan timbal balik, saling ketergantungan, kesamaan, bersama, berbagi tahap hubungan satu sama lain, pertukaran gagasan dan merencanakan bersama-sama, dan memiliki kebersamaan satu sama lain; c) Representasi (*representation*). Tema ini adalah berkaitan orientasi tindakan dan menjelaskan aktivitas advokat dengan berbicara, menulis, atau bertindak bagi pihak lain, berkomunikasi atau pernyataan kepedulian terhadap klien; d) Klien (*client*). Dalam advokasi pekerjaan sosial, seorang klien (-klien) mendelegasikan kepada pekerja sosial untuk bertindak atas dirinya yaitu *representation* sebagaimana yang

disebutkan di atas; e) Masalah/penyebab (*cause*). Masalah biasanya isu tunggal, kondisi, atau masalah yang menyebabkan sejumlah orang berminat dan mendukung. Menurut Kotler (1972) ada tiga jenis penyebab, yaitu: (1) *helping cause*, masalah pertolongan dimana advokat mencoba memberikan pertolongan, kenyamanan, atau pendidikan kepada korban kesalahan bantuan sosial termasuk rumah perlindungan (*shelter*) bagi wanita korban kekerasan atau perlindungan kepada lanjut usia; (2) *protest causes*, tindakan protes, dimana advokat mencoba mereformasi institusi yang menimbulkan masalah sosial, mempersoalkan tingkah laku baru untuk memperbaiki kondisi, contohnya rehabilitasi lingkungan pemukiman kumuh, atau menuntut agar pemerintah mengalokasikan dana untuk pelayanan kesehatan mental berbasis masyarakat; (3) *revolutionary causes*, dalam hal ini advokat berharap dapat mengurangi institusi atau pihak-pihak yang tidak mendukung perbaikan kondisi; f) Forum (*forum*). Sebuah forum adalah majelis yang diorganisir untuk mendiskusikan isu, undang-undang, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, masalah publik, atau penyampaian opini; g) Sistematis (*systematically*). Advokasi pada dasarnya bersifat sistematis. Hal ini karena advokasi menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu perencanaan. Keputusan tidak didasarkan kepada intuisi melainkan berdasarkan keterampilan menganalisis situasi bersama klien; h) Pengaruh (*influence*). Pengaruh bermaksud modifikasi, perubahan, kesan, tindakan atau keputusan yang mempengaruhi klien. Beberapa aktivitas mempengaruhi termasuk mengorganisir kelompok klien, pembentukan koalisi, pendidikan publik, persuasi kepada administrator dan supervisor, berhubungan dengan pegawai pemerintah dan parlemen, pengumpulan data kajian, pemberian testimoni, pengembangan petisi, dan bahkan tindakan undang-undang (Hepworth, et.al., 1997); i) Pembuatan keputusan (*decision making*). Tema ini merujuk kepada usaha mempengaruhi. Paling utama adalah advokat

ingin melakukan perubahan dengan membuat keputusan berdasarkan rumusan dan penilaian mengenai berbagai aspek seperti alokasi sumber daya, keuntungan, kelayakan, dan akses pelayanan; j) Tingkat ketidakadilan (*unjust*). Karakteristik terma ini adalah suatu tindakan, pendirian, institusi, peraturan, prosedur atau keputusan tidak sesuai dengan undang-undang atau prinsip-prinsip keadilan; k) Tidak responsive (*unresponsive*). Terma ini khususnya diterapkan kepada perorangan atau institusi yang gagal menjawab, mengakui, atau merespon terhadap pertanyaan, permohonan, petisi, tuntutan, surat, komunique, atau permohonan sesuai dengan masanya; i) Sistem (*system(s)*). Dalam konteks pekerjaan sosial, perkataan sistem merujuk kepada badan yang terorganisasi yang didesain dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang yang layak, mendistribusikan sumber, penegakan hukum dan bertanggung jawab penuh dalam interaksi masyarakat dengan sistem sumber. Sistem-sistem tersebut dapat berupa sistem pengadilan kriminal, sistem jagaan kesehatan, dan sistem transportasi. Setiap sistem selalu terorganisir dan ada mandat untuk memberikan bantuan akses, sumber-sumber, dan pelayanan yang diberikan.

Kerangka kerja kegiatan advokasi yang akan dilakukan mengacu pendapat dari Lester (2012:112-135), sebagai berikut: a) Menggunakan forum, b) Kesempatan untuk meningkatkan kesadaran, c) Kesempatan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, d) Kapasitas untuk membuat keputusan atau rekomendasi pembuat keputusan.

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui kampanye dengan taktik *public hearing*, audiensi, lobi dan media massa. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan perubahan pada tataran pengetahuan atau pemahaman baik kepada masyarakat maupun pemerintah desa tentang perlunya dukungan pemerintah desa dalam program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan. Selain itu tim

advokasi memberikan sosialisasi program baik mengenai maksud dan tujuan dari program pemberdayaan perempuan keluarga miskin maupun tentang manfaat bagi kelompok dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kemudian peneliti melakukan kegiatan lobi kepada pihak pemerintah desa dan kelembagaan desa. Diharapkan pemerintah desa memberikan dukungan kepada pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin, terutama memberikan pengakuan secara legalitas terhadap program tersebut sehingga ke depannya diharapkan dukungan moril maupun materiil dapat dilakukan pula oleh pemerintah desa.

Berdasarkan peranan-peranan yang dipaparkan Zastrow dalam Huraerah (2008:149–151) maka dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai: a) Advokat/Pembela. Peran pembelaan dalam advokasi pekerjaan sosial adalah dengan cara menyampaikan aspirasi kepada pengambil dan pelaksanaan kebijakan agar mendukung dan mengakomodir kebutuhan perempuan keluarga miskin; b) Perencana Sosial (*Expert*). Dalam menangani permasalahan perempuan keluarga miskin perlu dilakukan pengumpulan dan analisis fakta-fakta tentang masalah sosial, kemudian menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah sosial tersebut. Kemudian mengembangkan program, mencari alternatif sumber pendanaan, dan mengembangkan konsensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat dan kepentingan; c) Pemungkin (*Enabler*); d) Peranan sebagai *enabler* adalah membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menanganinya secara lebih efektif dengan membangkitkan kesadaran masyarakat, mendorong pengorganisasian, memelihara relasi interpersonal, dan memfasilitasi perencanaan sehingga masyarakat dapat menolong diri mereka sendiri; e) Mediator. Dalam melaksanakan kegiatan advokasinya dengan berbagai pihak, sangat mungkin muncul perbedaan

pemahaman dan keinginan diantara tim advokasi. Kerentanan konflik antara tim advokasi dengan sasaran advokasi sosialnya dapat melemahkan tujuan advokasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan keluarga miskin. Dampak konflik dapat berpengaruh terhadap keutuhan internal tim advokasi maupun terhadap klien atau kelompok, serta semakin melebarnya ketidakharmonisan antara tim advokasi dengan lembaga pemerintahan desa yang menjadi sasaran advokasi. Peran sebagai mediator dapat membantu menjadi penengah antara tim advokasi dengan sasaran advokasi; f) Broker. Tim advokasi dalam melaksanakan perjuangan pemenuhan hak warganya umumnya menghadapi masalah yang kompleks. Agar masalah tersebut dapat diuraikan dengan baik maka memerlukan penghubung yang handal. Peran sebagai broker yang dijalankan peneliti adalah menghubungkan tim advokasi dengan berbagai sumber dan pemangku kepentingan.

### Tujuan

Tujuan umum adalah mengembangkan dan menyusun advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan. Tujuan khusus meliputi: 1) mereview program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan. 2) menyusun perencanaan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan. 3) mengimplementasikan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan. 4) menyusun penyempurnaan model program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Manfaat praktis adalah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis dalam upaya pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan. Juga menjadikan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin sebagai model pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan. 2) Manfaat teoritis adalah: 1) hasil penelitian

diharapkan dapat bermanfaat bagi praktik pekerjaan sosial, khususnya mengenai implementasi teknik advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dijadikan sebagai model pemberdayaan perempuan keluarga miskin di RW 07 Desa Cimenyan. 2) hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan empirik dalam proses advokasi khususnya advokasi bagi keluarga miskin.

### Metode

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi". Desain penelitian yang dilakukan adalah *action research*, yaitu merupakan upaya mengujicobakan ide-ide ke dalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi. Penelitian *action research* adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana sebagian besar data yang didapat dalam penelitian ini adalah data ujaran, hasil percakapan para personil yang terlibat dalam penelitian, dan tidak selalu dikonversikan dalam bentuk angka. Hal ini diperkuat dengan pendapat Suwarsih Madya (2006:75-76), bahwa dalam penelitian tindakan akan lebih bagus jika dalam menganalisis data yang kompleks peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, yang salah satu modelnya adalah teknik analisis interaktif. Penelitian tindakan ini dilakukan untuk proses pembelajaran bersama antara peneliti, pihak yang diteliti, dan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) atas upaya-upaya mencari penyelesaian masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, hasilnya tidak hanya memberikan manfaat pada peneliti tetapi dapat memberikan sumbangan konkrit terhadap penyelesaian masalah sosial secara umum, seperti dikemukakan oleh Reason dan Bradbury dalam Suwarsih Madya (2007):

“...penelitian tindakan adalah proses partisipatoris dan demokratis... yang memadukan tindakan dengan refleksi, teori dengan praktik yang menyertakan pihak lain untuk menemukan solusi praktik terhadap persoalan-persoalan yang menyesakkan dan lebih umum lagi demi pengembangan individu-individu bersama komunitasnya”.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Cimenyan dengan jangka waktu yang diperlukan dalam proses penelitian ini adalah selama enam bulan, yaitu pada bulan Januari sampai dengan Juni 2017. Lokasi yang digunakan adalah RW 07 Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung

Cara menentukan sumber data adalah teknik purposive, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan bahwa orang-orang tersebut dianggap paling mengetahui dan memahami mengenai masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2014:225) bahwa: “Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder”. Sasaran informan adalah tim kerja masyarakat, anggota kelompok perempuan keluarga miskin, masyarakat RW 07, tokoh masyarakat dan kepala desa yang merupakan sasaran advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Karakteristik informan yang diwawancarai secara terpisah dalam penelitian ini merupakan satu kesatuan dari para pihak yang memiliki relevansi yang sama mengenai substansi dari penelitian, yang dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Jumlah informan yang digunakan sebagai sumber data primer sebanyak 11 orang.

Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumentasi dan FGD (*Focus Grup Discussion*). Teknik pemeriksaan keabsahan data atau kevalidan data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Sugiyono (2014:294) teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara diantaranya uji kredibilitas yang

dilakukan dengan cara: 1) Perpanjangan pengamatan, dimana peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menjalin relasi yang semakin akrab dengan masyarakat, tim kerja masyarakat dan kelompok agar partisipan semakin terbuka dan terbentuk hubungan yang didasari saling percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Lamanya perpanjangan pengamatan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. 2) Meningkatkan ketekunan, adalah melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan agar kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Pengecekan kembali dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh benar atau tidak, serta dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis. 3) Triangulasi, triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai data pembanding. Teknik triangulasi yang biasa digunakan adalah membandingkan dengan sumber atau data lain. Hal ini dirasa sangat sempurna, sebab tanpa adanya teknik triangulasi data, maka sulit untuk mengetahui sejauhmana keakuratan data yang didapatkan. 4) Transferability dengan membuat laporan hasil penelitian dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan selama di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988), menyatakan bahwa “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”.

Tahapan penelitian diawali dengan tahap persiapan selama satu bulan, yang terdiri dari: penyusunan proposal penelitian, seminar proposal penelitian, perbaikan proposal



penelitian, perizinan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, dilaksanakan selama tiga bulan yang meliputi: melakukan refleksi awal, melakukan perencanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun, melakukan evaluasi terhadap intervensi yang sudah dilakukan. Dan tahap terakhir yaitu tahap pengakhiran dilakukan selama dua bulan yang meliputi kegiatan penyusunan laporan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Desa Cimenyan terdiri dari 23 RW dan 83 RT. Desa Cimenyan mempunyai luas wilayah 1.055.750 Ha dengan komposisi tanah sawah 17 Ha; perkarangan, bangunan dan halaman 71 Ha; tegal/ladang 662,007 Ha/kolam/empang 7Ha; fasilitas umum 48,743Ha; dan hutan 250 Ha. Jumlah penduduk Desa Cimenyan adalah sebanyak 14.820 jiwa yang terdiri dari 4.057 KK, dengan jumlah laki-laki 7.521 jiwa dan perempuan 7.299 jiwa. Penduduk yang berusia produktif antara 15-64 tahun sebanyak 67,89%. Sebagian besar penduduknya (47,79%) berpendidikan setingkat SD. Penduduk Desa Cimenyan sebagian besar bekerja di sektor pertanian atau buruh tani yaitu 28,91%, dan 19,47% bekerja di sektor industri atau sebagai buruh pabrik. Berdasarkan data profil Desa Cimenyan Tahun 2017 bahwa terdapat 3.235 keluarga pertanian yang diataranya sebanyak 1.195 anggota keluarga menjadi buruh tani. Desa Cimenyan merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 800 sampai 1.300 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara rata-rata 20 derajat celcius. Batas Desa Cimenyan meliputi: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sunten Jaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Padasuka Kota Bandung, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Saluyu dan Ciburial, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mandala Mekar dan Mekar Manik Kecamatan Cimenyan.

Target atau aspek yang diadvokasi dalam program pemberdayaan perempuan keluarga miskin adalah a) Legalitas program. Target utama dari kegiatan advokasi ini adalah diperolehnya legalitas formal dari pemerintah desa terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui kegiatan KUMM, sehingga adanya legalitas program pemberdayaan perempuan keluarga miskin ini diharapkan adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah desa yang berdampak terhadap semakin maksimalnya pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Di samping itu dengan adanya pengakuan atau legalitas tersebut akan lebih memperkuat keberadaan program sebagai model atau contoh dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di wilayah Desa Cimenyan; b) Dukungan moril dalam pengembangan jaringan. Disamping dukungan yang bersifat legalitas program pemberdayaan perempuan keluarga miskin, diharapkan pula dengan adanya legalitas tersebut, dukungan moril akan diperoleh oleh program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Diharapkan dengan keluarnya Surat Keputusan dan surat keterangan usaha dari pemerintah desa akan mempermudah dalam pengurusan perizinan produksi usaha ekonomi produktif (P.IRT) kelompok dalam rangka mengembangkan jaringan (*networking*) ke dunia usaha yang lebih luas lagi; c) Dukungan materi. Dalam dukungan materi, diharapkan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah desa. Ditambah dengan adanya Badan Keswadayaan Masyarakat yang bertanggung jawab langsung dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga kedepannya program pemberdayaan perempuan keluarga miskin ini mendapatkan bantuan dana dalam pengembangannya. Sehingga kesejahteraan perempuan keluarga miskin akan naik.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin Di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Upaya yang dilakukan peneliti adalah jawaban dari sumber atau pokok utama penelitian “Bagaimanakah advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Beberapa bagian pada hasil penelitian ini akan menjawab beberapa aspek pertanyaan sebagai berikut: (1) Review program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dari pemerintah setempat, (2) Rencana model advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin, (3) Implementasi advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin, dan (4) Penyempurnaan model pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

#### (1) Review program pemberdayaan perempuan keluarga miskin

Salah satu upaya yang telah dilaksanakan dalam penanganan kemiskinan terutama perempuan keluarga miskin sampai saat ini yaitu program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui kelompok. Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin ini dimulai dengan pembentukan kelompok perempuan keluarga miskin yang merupakan hasil asesmen peneliti ketika melakukan penelitian awal yaitu pada bulan Juli 2016. Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa rendahnya pendidikan, keterampilan dan kurangnya pengetahuan dalam mengakses berbagai sumber pemecahan masalah mengakibatkan mereka sulit untuk keluar dari permasalahan mereka. Permasalahan tersebut akhirnya membuat para perempuan keluarga miskin mengharapkan adanya suatu wadah yang bisa menampung aspirasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Berdasarkan kesepakatan perempuan keluarga miskin dan para tokoh masyarakat yang dikumpulkan dalam sebuah diskusi, dibentuklah suatu kelompok perempuan keluarga miskin.

Program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui kelompok ini dilakukan

dengan beberapa kegiatan seperti menyelenggarakan usaha ekonomi produktif, pelatihan dodol peuyeum, dan pelatihan administrasi keuangan sederhana dan melakukan kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial. Dari sejak dimulainya program pemberdayaan perempuan keluarga miskin ini sampai bulan Desember 2016, hampir enam bulan sejak pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin, ternyata dirasakan masih belum maksimal sesuai harapan mereka. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yang sudah dilaksanakan sebelumnya peneliti melakukan *indepth interview* kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya yakni interview terhadap tokoh masyarakat, tim kerja masyarakat, dan anggota kelompok perempuan keluarga miskin. Berdasarkan hasil *indepth interview* dari beberapa informan tersebut tentang program pemberdayaan perempuan dapat diketahui bahwa meskipun program itu dilaksanakan di RW 07 yang dekat dengan pemerintahan desa, akan tetapi belum adanya tanggapan dan dukungan yang maksimal dari pihak pemerintah desa.

Idealnya peran pemerintah desa seharusnya lebih bisa berperan aktif dalam memperhatikan program-program pemberdayaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa, tugas pokok dan fungsi kepala desa dan perangkat desa disebutkan bahwa salah satu tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fungsi kepala desa adalah 1) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 2) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Oleh karena itu, akan lebih

baik lagi jika pihak-pihak terkait yang seharusnya berperan aktif dalam program pemberdayaan perempuan keluarga miskin adalah pihak pemerintah desa beserta lembaga-lembaga yang ada di desa, seperti yang diutarakan oleh salah satu tim kerja masyarakat yang mengatakan bahwa yang mempunyai peran dalam program pemberdayaan perempuan keluarga miskin adalah semua unsur pemerintah desa, mulai dari kepala desa, staf desa, lembaga-lembaga desa yang terkait sampai ketua RW dan RT pun ikut berperan dalam keberlangsungan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin.

Setelah diperoleh hasil dari *indepth interview* dengan informan, maka diperlukan suatu kegiatan pokok sebagai langkah dalam menguatkan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yaitu advokasi. Dengan adanya advokasi diharapkan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin mendapatkan perhatian dan pengakuan serta dukungan maupun pembinaan langsung dari pemerintah, serta pada akhirnya program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dijadikannya model atau contoh dalam pemberdayaan kelompok lainnya di Desa Cimenyan.

## (2) Perencanaan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin

Perencanaan program adalah hal penting yang harus dirancang dalam rangka memberikan landasan dasar untuk menjalankan kegiatan dan untuk menilai kemajuan pekerjaan. Sebuah perencanaan program dirancang dengan baik akan memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka kerja untuk tahap pelaksanaan program. Berdasarkan review program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yang di dibahas peneliti bersama para informan, maka diperoleh sebuah isu yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan rencana kegiatan advokasi program. Berdasarkan dari hasil *indepth interview* dengan para informan, maka dapat ditarik

kesimpulan yaitu kurangnya dukungan dari pihak pemerintah desa terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Oleh karena itu peneliti mengumpulkan dan mengajak tokoh masyarakat, kelompok serta tim kerja masyarakat untuk melakukan *FGD* untuk membahas rencana yang akan dilakukan dalam rangka kegiatan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin.

Dalam *FGD*, peneliti meminta tokoh masyarakat, kelompok dan tim kerja masyarakat untuk mengutarakan ide-ide mereka, mengajak mereka agar aktif untuk mengeluarkan pendapat mereka terkait rencana apa yang akan dilakukan, sehingga apa yang dilakukan dalam kegiatan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin sesuai dengan permasalahan, harapan, keinginan dan kebutuhan mereka. Dari hasil *FGD* diperoleh hasil bahwa program pemberdayaan perempuan keluarga miskin harus disosialisasikan ke pihak pemerintah desa dan kelebagaannya. Kegiatan mensosialisasikan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin tersebut bertujuan agar memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah desa dan kelebagaannya. Selain itu hasil *FGD* disepakati pula bahwa akan dilakukan koordinasi dengan pihak Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) selaku sponsor, media massa lokal “noong” dan STKS serta pihak pemerintah desa.

## (3) Implementasi advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin

Tahap awal yang dilakukan tim kerja masyarakat didampingi oleh peneliti dalam kegiatan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yaitu melakukan kegiatan koordinasi dengan Tim PKPU, media massa lokal “noong”, STKS serta pihak pemerintah desa. Hasil dari koordinasi tersebut yaitu PKPU menjadi sponsor utama dalam pelaksanaan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. PKPU siap membantu kegiatan peneliti dalam melakukan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui kegiatan

audiensi dan *public hearing*. Selain itu PKPU bersedia memberikan dana stimulan dan sarana usaha bagi pengembangan usaha kelompok perempuan keluarga miskin sebagai modal usaha. Hasil koordinasi dengan media massa lokal “noong” yaitu akan mendukung pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di wilayah Desa Cimenyan, dengan akan mempublikasikannya ke dalam media massanya sehingga sosialisasi program tersebut akan memperkuat tersampainya maksud dan tujuan dari kegiatan audiensi dan *public hearing* yang akan dilaksanakan. Hasil koordinasi dengan pihak pemerintah desa yaitu pemerintah desa akan memfasilitasi kegiatan audiensi dan *public hearing* dengan menyediakan tempat kegiatan yakni aula desa.

Implementasi advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dilaksanakan melalui audiensi dan *public hearing* yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 di aula desa Cimenyan. Tujuan dari kegiatan audiensi dan *public hearing* tersebut antara lain: 1) mensosialisasikan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin kepada pemerintah desa dan lembaga desa serta tokoh masyarakat di Desa Cimenyan; 2) agar program tersebut mendapatkan pengakuan dan dukungan oleh pemerintah desa; 3) agar kelompok perempuan keluarga miskin mendapatkan pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang membuat ibu-ibu kreatif; 4) agar program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dapat dijadikan model pemberdayaan kelompok lainnya di Desa Cimenyan. Kegiatan audiensi dan *public hearing* dihadiri oleh pihak Pos keadilan penduli umat (PKPU), STKS, pihak desa yang diwakili oleh sekretaris desa, lembaga desa seperti BPD, LPMD, PKK Desa, MUI, BUMDES dan BKM. Kegiatan juga dihadiri oleh kelompok dan tokoh masyarakat.

Pelibatan pihak media massa lokal “noong” dalam kegiatan audiensi dan *public hearing* merupakan salah satu taktik untuk memperkuat proses advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin.

Taktik tersebut dilakukan untuk mempengaruhi pihak pemerintah desa agar bersedia memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta mempertimbangkan dan pada akhirnya menjadikan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin sebagai model atau contoh dalam program pemberdayaan perempuan berikutnya di Desa Cimenyan. Media massa lokal “noong” merupakan media massa yang selalu menginformasikan informasi-informasi penting bagi warga Desa Cimenyan khususnya dan Kecamatan Cimenyan pada umumnya. Media massa ini terbit sebulan sekali dan selalu berupaya meningkatkan pengetahuan warga masyarakat melalui informasi-informasi yang *up to date*.

Hasil dari kegiatan audiensi dan *public hearing* tersebut yaitu tersampainya informasi kepada pemerintah desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, dan anggota Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat (KUMM) maupun masyarakat tentang pentingnya program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui kelompok usaha mandiri masyarakat sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga sehingga diharapkan program tersebut bisa dijadikan sebagai model atau contoh dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan keluarga miskin lainnya di Desa Cimenyan.

Kegiatan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin tidak hanya dilakukan melakukan kegiatan audiensi dan *public hearing* maupun media massa. Kegiatan advokasi program ini juga diperkuat dengan kegiatan seperti:

#### a) Tahap *Lobbying*

Setelah selesai kegiatan audiensi dan *public hearing* dan menggunakan media massa sebagai langkah mempengaruhi pemerintah desa, peneliti kembali memotivasi tim kerja masyarakat untuk melakukan lobi kepada pihak desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi

dan *public hearing* serta penggunaan media massa lokal.

Tim kerja masyarakat dan peneliti melakukan lobi kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu lembaga desa yang memiliki wewenang dalam penentuan kebijakan desa, pihak BPD pada dasarnya mendukung keberadaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan, begitu pula lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) pun siap mendukung terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Dan yang terpenting lobi dilakukan kepada Kepala Desa Cimenyan berkaitan dengan pihak yang penting dalam keberhasilan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Langkah berikutnya adalah pembahasan mengenai tindak lanjut program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dapat dijadikan sebagai model dalam program pemberdayaan kelompok lainnya apabila mengalami situasi situasi yang sama di Desa Cimenyan. Hasil dari lobi dengan kepala desa yaitu pada intinya kepala desa mendukung program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat di desanya dan bersedia melegalkan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dengan mengeluarkan Surat Keputusan dan surat keterangan usaha kelompok untuk mendapatkan surat ijin produksi usaha ekonomi produktif (P.IRT) ke Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.

#### b) Kegiatan Pelatihan

Setelah kegiatan *audiensi* dan *public hearing* serta lobi dengan pihak pemerintah desa termasuk lobi dengan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa, kegiatan selanjutnya yaitu pemberian pelatihan dan *launching* bantuan ekonomi bergulir bagi anggota kelompok perempuan keluarga miskin yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei dan 5 Juni 2017 bertempat di rumah salah satu anggota kelompok. Kegiatan tersebut dihadiri

oleh seluruh anggota kelompok perempuan keluarga miskin, pihak PKPU dan tokoh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut anggota kelompok perempuan keluarga miskin diberikan pelatihan tentang kewirausahaan. Tujuannya adalah agar anggota kelompok memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara berwirausaha yang baik, menciptakan jejaring, meningkatkan motivasi dalam berwirausaha. Sehingga diharapkan setiap anggota kelompok mempunyai jiwa usaha yang pada akhirnya akan mampu mengeluarkan perempuan keluarga miskin mampu keluar dari masalah mereka.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjukkan kepada pemerintah desa bahwa program-program pemberdayaan perempuan keluarga miskin sudah dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari adanya antusias dan motivasi perempuan keluarga miskin untuk selalu mengikuti setiap pelatihan yang diadakan pada program pemberdayaan keluarga miskin.

Pendampingan terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui kelompok usaha mandiri masyarakat sudah dilakukan sejak terbentuknya kelompok perempuan keluarga miskin yaitu sejak bulan Agustus 2016 sampai Desember 2016. Kemudian kegiatan pendampingan tersebut dirujuk dan dilanjutkan oleh pihak sponsor yaitu pihak yang membantu dalam program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yaitu PKPU. Pendampingan kelompok oleh PKPU dilakukan secara intensif melalui pertemuan rutin bulanan selama satu tahun. Pendampingan tersebut berupa pendampingan *home visit* secara individu yaitu kunjungan ke rumah anggota kelompok perempuan keluarga miskin sebulan sekali. Dan pendampingan secara kelompok melalui pertemuan yang dilakukan tanggal 5 setiap bulannya dengan tempat di rumah anggota kelompok secara bergantian.

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan diatas, diharapkan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dapat membuktikan

kepada pemerintah desa memiliki kelebihan dari program pemberdayaan perempuan keluarga miskin lainnya di Desa Cimenyan. Karena selama ini program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yang ada di Desa Cimenyan baru sebatas bantuan ekonomi bergulir belum diikuti dengan tindak lanjut lainnya seperti pelatihan maupun support pendampingan baik untuk individu maupun kelompok. Advokasi yang dilakukan dalam program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dapat dikatakan memiliki keunggulan dari pemberdayaan perempuan keluarga miskin lainnya karena program pemberdayaan perempuan keluarga miskin ini memberikan perubahan cara berfikir masyarakat pada umumnya dan perempuan keluarga miskin secara khusus maupun pemerintah desa karena disamping pemberian bantuan ekonomi bergulir, didalamnya mencakup pelatihan yang dapat membuka wawasan dan pola berfikir serta pemahaman bagi penerima manfaatnya disamping itu kegiatan pendampingan dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan selama 1 tahun.

c) Pengurusan izin produksi usaha ekonomi produktif kelompok (P.IRT) ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung

Setelah dilakukan pelatihan branding dan pemberian label pada produksi usaha kelompok dilanjutkan dengan pengurusan izin produksi usaha ekonomi produktif kelompok (P.IRT) ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Pengurusan perijinan produksi usaha ekonomi produktif kelompok dilakukan mulai bulan Juni hingga saat ini masih dalam proses keluarnya surat izin tersebut. Proses dikeluarkan nomor ijin produksi usaha ekonomi produktif kelompok (No.P.IRT) ini harus melalui beberapa tahapan antara lain: pengujian bahan baku, pengujian daya tahan produk, dan pengujian nilai kadar kandungan air.

Dampak dari advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin:

Uraian pelaksanaan kegiatan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin tersebut mempunyai dampak positif bagi beberapa pihak yang terkait dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Berikut adalah dampak dari advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin secara khusus: a) Bagi perempuan keluarga miskin. Perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan yang semula cenderung tertutup ataupun kurang dalam menyampaikan aspirasinya karena malu ataupun kurang percaya diri mulai membiasakan terbuka dan berani menyampaikan aspirasinya kepada anggota kelompok yang lain ataupun pihak pemerintah desa sehingga bertambahnya pengetahuan tentang cara mengeluarkan pendapat atau aspirasinya dengan baik dan benar, bagaimana melakukan jejaring, bagaimana menumbuhkan motivasi dan kerja sama agar apa yang menjadi hambatan dapat diatasi bersama-sama dan adanya upaya perempuan keluarga miskin untuk keluar dari masalahnya. Selain itu dengan adanya advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin, mereka mulai memperoleh berbagai pengetahuan dan kemampuan baru melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan baik oleh sponsor sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus meningkatnya kesejahteraan perempuan keluarga miskin itu sendiri maupun keluarganya. Salah satu keberhasilan yang ditunjukkan oleh anggota kelompok perempuan keluarga miskin setelah mendapatkan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yaitu ibu "E".

Setelah mendapatkan dukungan bantuan dana dari sponsor akhirnya Ibu "E" bisa mengembangkan usahanya atau lebih tepatnya bisa membuka usaha barunya yang tadinya terfokus pada usaha surabi, kini ia bisa membuat kerajinan tangan dari akar bambu yang diolah sedemikian rupa menjadi sebuah hiasan pajangan. Dan hasil karyanya ini, Ibu "E" sudah mendapatkan pesanan dari Saung Udjo sebanyak 10 buah, dan hasil karyanya ini ia jual seharga Rp. 300.000,-/buah. Keberhasilan Ibu "E" ini diharapkan menjadi

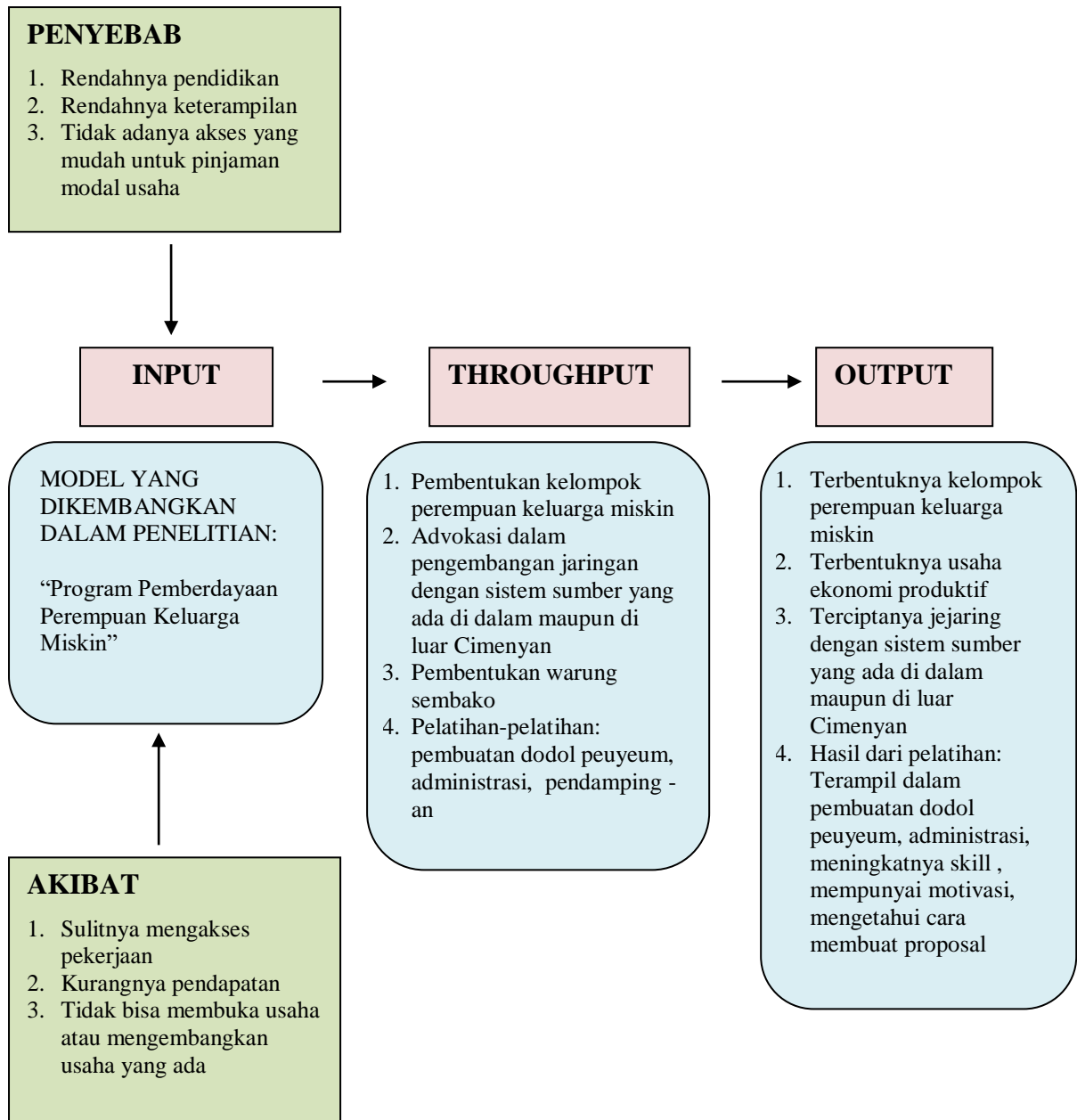
penyemangat bagi anggota kelompok yang lain untuk mengembangkan usaha yang dimiliki, sekaligus membuktikan kepada pihak pemerintah desa bahwa ada manfaat yang dirasakan oleh perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan setelah mendapatkan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. b) Bagi kelompok usaha mandiri masyarakat. Pihak desa memberikan dukungan berupa legalitas yang berbentuk pengesahan program sekaligus kelompok dan surat keterangan usaha dalam pengurusan izin P.IRT produk olahan kelompok ke Disperindag kabupaten yang juga diketahui oleh pihak kecamatan, selain itu dukungan juga diberikan oleh PKK desa berupa kerjasama yang dituangkan dalam bentuk berita acara dengan diikutsertakannya produk dodol peuyeum dalam bazar maupun even yang diadakan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. c) Bagi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Dengan dilakukannya advokasi program melalui *audiensi dan public hearing, lobbying* dan media massa, program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dapat berjalan dengan maksimal ke depannya. Dengan demikian program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dapat dijadikan model atau contoh di dalam program pemberdayaan kelompok lainnya di desa segera terlaksana sesuai dengan tujuan akhir dari advokasi itu sendiri. Selain itu dengan adanya dukungan moril yang diberikan oleh lembaga-lembaga desa yang ada seperti BKM, PKK desa, BPD dan LPMD terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin akan lebih memperkuat dalam pengembangan ataupun terlaksananya tujuan akhir dari advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dengan segera.

Kegiatan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dapat diselesaikan dengan lancar dan baik sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Hasil dari kegiatan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin tersebut dapat dicapai sesuai tujuan. Secara umum, berikut adalah hasil dari kegiatan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin secara umum: a) Adanya konektivitas antara PKPU dan masyarakat yang berujung pada penyaluran berbagai dana program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. b) Penerimaan pemerintah desa (legalitas program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui dikeluarkannya SK dan Surat Keterangan Usaha untuk mengurus perizinan produk usaha (P.IRT) ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kkabupaten. c) Keterlibatan beraneka ragam komponen masyarakat dan sasaran itu sendiri seperti PKK dan Saung Udjo sebagai mitra usaha untuk memasarkan hasil produk.

#### (4) Penyempurnaan model program pemberdayaan perempuan keluarga miskin

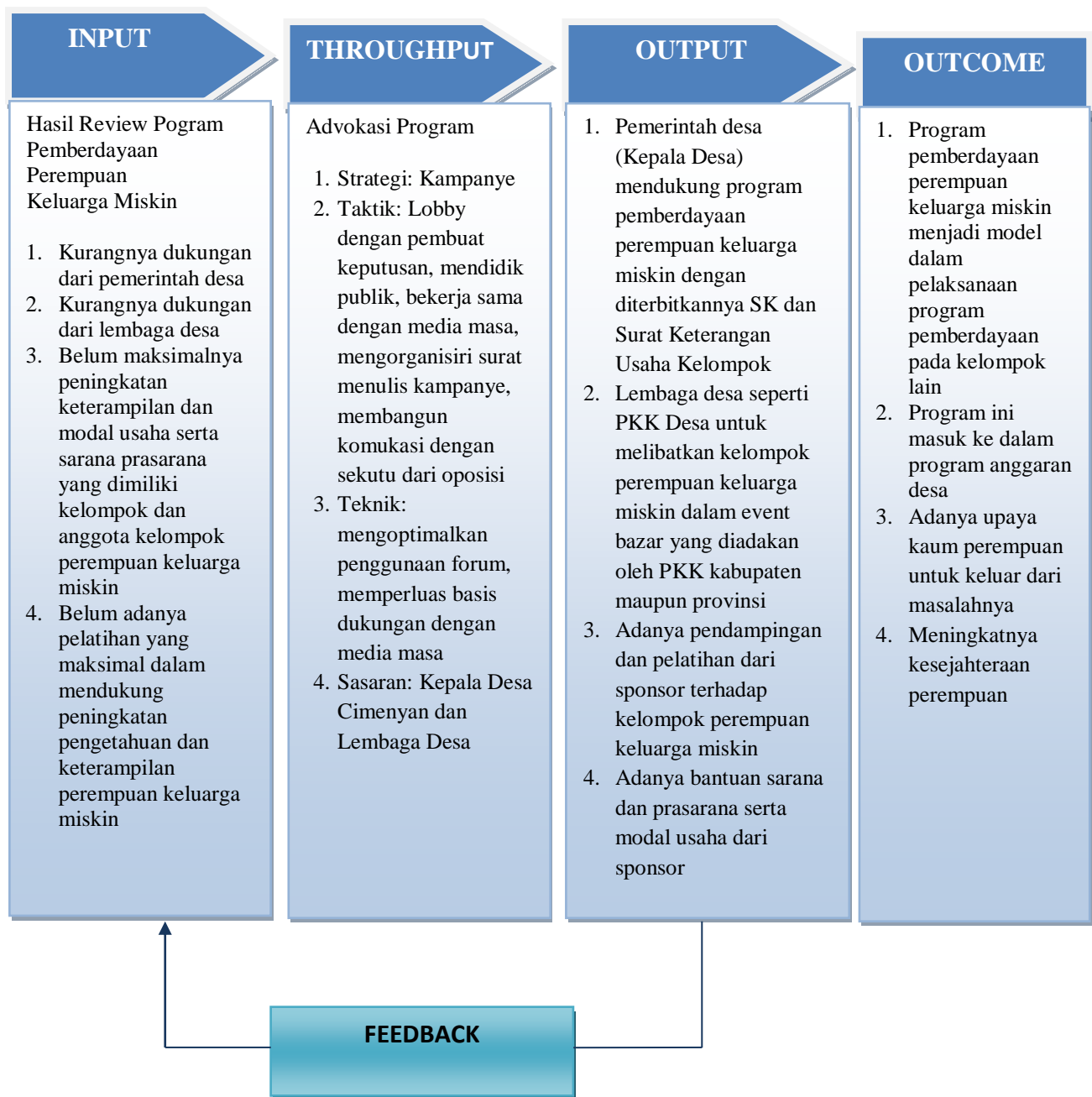
Hasil dari penyempurnaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin adalah adanya model awal ditambah dengan kelompok usaha mandiri masyarakat (KUMM) dilengkapi dengan dukungan dari pihak sponsor dan dukungan pemerintah desa.

Di bawah ini dapat dilihat gambaran/ rangkuman Model Awal Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin (gambar 1) dan Model Akhir Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin (gambar 2) beserta penjelasannya.



**Gambar 1**  
**Model Awal Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin**





Gambar 2  
Model Akhir Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin

Pada model awal, program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dilakukan hanya sebatas pembentukan kelompok perempuan keluarga miskin dengan kegiatan warung sembako, pelatihan administrasi sederhana dan pelatihan pembuatan dodol peuyeum. Modal usaha dalam kegiatan usaha warung sembako sangat terbatas, sehingga hanya bergantung pada pemilik heler beras dan peternak ayam petelur untuk melakukan konsinyasi. Meskipun dengan modal serba terbatas dan perlengkapan seadanya, program pemberdayaan perempuan keluarga miskin masih bisa melakukan kegiatan pelatihan pembuatan dodol peuyeum, pelatihan administrasi secara sederhana dan melakukan jejaring kerja atau mitra usaha dengan para pedagang oleh-oleh khas Bandung di sekitar Jalan Pasteur Bandung. Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin ini berjalan hanya dengan mengandalkan harapan dari para tim kerja masyarakat dan beberapa anggota kelompok untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga bisa dikatakan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin belum bisa berjalan secara maksimal dan hal ini terkadang mengakibatkan maju mundurnya setiap kegiatan dalam usaha memproduksi dodol peuyeum dan warung sembako.

Berdasarkan hal tersebut kemudian peneliti melakukan review untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh program pemberdayaan perempuan keluarga miskin tersebut. Dari hasil review dengan beberapa anggota kelompok, tim kerja masyarakat dan tokoh masyarakat dan masyarakat yang peduli dengan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin, maka diperoleh hasil bahwa kegiatan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin terkendala karena kurangnya perhatian dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu peneliti bersama tim kerja masyarakat dan kelompok melakukan *FGD* untuk merencanakan suatu kegiatan agar memperoleh dukungan dari pemerintah desa maupun pihak-pihak luar yang dapat memberikan dukungan terhadap program

pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Dengan menggunakan strategi kampanye, taktik melakukan audiensi dan *public hearing*, lobi kepada pembuat keputusan (kebijakan), dalam hal ini pihak kepala desa. Selain itu penggunaan media massa juga dilakukan dengan harapan akan mempermudah tercapainya tujuan dari advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yaitu program pemberdayaan perempuan keluarga miskin mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah desa serta ke depannya dapat dijadikan sebagai model dalam program pemberdayaan pada kelompok lain di Desa Cimenyan. Ditambah dengan pelatihan-pelatihan yang akan diberikan oleh pihak sponsor untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi perempuan keluarga miskin yang tanpa terkecuali akan melibatkan juga pihak pemerintah desa. Hal ini akan lebih mempercepat perhatian dan dukungan pemerintah desa terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Dan salah satu keberhasilan dari kegiatan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin ini adalah diterbitkannya Surat Keterangan dari pemerintah desa tentang program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui kelompok usaha mandiri masyarakat. Surat keterangan ini membuktikan bahwa pihak pemerintah desa sangat mendukung tentang pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui kegiatan kelompok perempuan keluarga miskin, walaupun dukungan tersebut masih berupa dukungan secara moril. Disamping itu dengan dikeluarkannya Surat Keterangan dan surat keterangan usaha kelompok, membantu kelompok dalam mengakses no izin produksi usaha ekonomi produktif kelompok berupa No.P.IRT dari Disperindag Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk memperoleh dukungan secara materil terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin masih membutuhkan proses dan juga tergantung pada hasil evaluasi program itu sendiri.

## Refleksi

Setelah dilakukannya kegiatan audiensi dan *public hearing*, *lobbying* dan pelibatan media masa beserta dukungan pihak sponsor, program pemberdayaan perempuan keluarga miskin mulai memperlihatkan adanya peningkatan baik dari diri perempuan keluarga miskin itu sendiri seperti adanya upaya untuk keluar dari masalahnya, adanya motivasi dan kreativitas untuk dalam melakukan usaha, keberanian dalam mengeluarkan aspirasinya kepada pihak pemerintah desa. Sedangkan dari segi jumlah perempuan keluarga miskin yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut, maupun dari segi jenis usaha yang dimiliki kelompok perempuan keluarga miskin dan

modal usaha yang dimiliki oleh perempuan keluarga miskin. Hal ini dipengaruhi oleh mulai percayanya anggota kelompok perempuan terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin, mulai adanya perhatian dan dukungan pihak pemerintah desa terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yang sudah berjalan, dan adanya dukungan yang maksimal dari sponsor yang peduli terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Gambaran di bawah ini adalah perubahan kondisi atau perkembangan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin setelah dilakukan advokasi program ke pemerintah desa.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin**  
**setelah Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin**

Kondisi Tahun 2016	Kondisi Tahun 2017
Perempuan keluarga miskin yang tadinya tertutup, takut mengeluarkan aspirasinya dan belum ada upaya yang maksimal untuk keluar dari masalahnya	Mulai berani membuka diri, percaya diri, membuka usaha keci-kecilan ataupun sampingan yang pada akhirnya bisa keluar dari permasalahannya
Belum adanya perhatian/ dukungan dari pemerintah desa	Sudah adanya dukungan dari pihak desa dengan diterbitkannya SK dan Surat Keterangan Usaha Kelompok untuk mendapatkan izin produksi usaha ekonomi produktif (No.P.IRT) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung.
Belum terjalannya kerja sama dengan lembaga desa seperti BPD, BKM, PKK, LPMD	Sudah adanya kerja sama dengan lembaga desa BKM dan PKK hal ini terlihat dengan ditandatanganinya Mou kerja sama antara kelompok perempuan keluarga miskin dengan pihak PKK sebagai mitra usaha dalam pengembangan usaha dodol peuyeum produksi perempuan keluarga miskin.
Belum adanya bantuan sarana usaha ekonomi produktif dari sponsor	Sudah adanya bantuan usaha baik sarana usaha ekonomi produktif berupa peralatan penunjang pembuatan produksi dodol peuyeum dari sponsor seperti timbangan elektrik, tabung gas, kompor gas, wajan, loyang, serta bertambahnya kuantitas barang-barang yang dijual di warung sembako yang dikelola oleh kelompok perempuan keluarga miskin.
Aktivitas anggota kelompok belum berjalan secara maksimal	Aktivitas anggota kelompok sudah mulai ada peningkatan mulai dari keaktifan anggota kelompok, sampai modal usaha yang mereka miliki.
Anggota kelompok hanya berasal dari wilayah RW 07	Anggota kelompok yang tergabung dalam kelompok usaha mandiri masyarakat selain dari wilayah RW 07, perempuan keluarga miskin dari RW lainpun sudah bisa terjangkau yakni dari RW 03 dan 19 sesuai permintaan kepala desa
Belum adanya pelatihan-pelatihan	Sudah dilaksanakannya pelatihan kewirausahaan, <i>marketing</i> dan <i>branding</i> . Hal ini dapat menambah wawasan para perempuan keluarga miskin terutama dalam cara mengembangkan usaha dengan permodalan yang terbatas, pemasaran hasil produksi dan cara pengemasan.

Berdasarkan gambaran di atas, maka didapatkan bahwa adanya dukungan baik dari pemerintah desa maupun lembaga-lembaga desa, dukungan dari sponsor, bertambahnya sarana dan modal usaha yang dimiliki, sudah mewakili dampak perubahan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Namun demikian, program ini masih sangat perlu untuk terus dikembangkan terutama dari segi peningkatan keterampilan anggota kelompok perempuan keluarga miskin, sehingga anggota perempuan keluarga miskin menyarankan bahwa perlunya adanya kegiatan pelatihan untuk lebih mengembangkan keterampilan dan jiwa usaha mereka, seperti pelatihan pengembangan usaha atau inovasi produk, kewirausahaan dan pelatihan lainnya yang dapat menunjang peningkatan produktivitas mereka secara berkelanjutan.

Mulai terlihatnya dukungan dari pemerintah desa dengan telah diusulkannya program pemberdayaan perempuan keluarga miskin untuk mendapatkan dana bantuan ke pemerintah kabupaten, dan sampai saat ini masih dalam proses persetujuan dari pihak pemerintah kabupaten. Ketercapaian tujuan jangka pendek dari pelaksanaan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin telah terpenuhi yakni tersosialisasinya program pemberdayaan perempuan keluarga miskin ke pemerintah desa dan lembaga desa. Sedangkan ketercapaian tujuan jangka panjang dari advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yaitu dijadikannya program tersebut sebagai model atau contoh program pemberdayaan kelompok lainnya dalam upaya pengurangan kemiskinan di Desa Cimenyan belum sepenuhnya bisa dilaksanakan karena masih memerlukan waktu dan melihat dari hasil evaluasi pelaksanaan program itu sendiri. Namun demikian keberlanjutan dari pelaksanaan program itu sendiri diharapkan nantinya akan meyakinkan pihak pemerintah desa dan kelembagaan desa khususnya serta tokoh masyarakat beserta masyarakat pada umumnya bahwa program pemberdayaan perempuan keluarga miskin

tersebut layak untuk dijadikan model atau contoh dalam pemberdayaan lainnya di Desa Cimenyan.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dapat disimpulkan sesuai dengan tuntutan fokus penelitian yang menjadi dasar penelitian ini. Fokus penelitian tersebut meliputi: (1) Review program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dari pemerintah setempat. Dari hasil di lapangan diketahui bahwa program pemberdayaan perempuan keluarga miskin tersebut belum bisa berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya modal usaha, keterampilan perempuan keluarga miskin yang terbatas dan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Realita yang kemudian muncul adalah meskipun berbagai kegiatan seperti usaha ekonomi produktif berupa warung sembako, pelatihan pembuatan dodol peuyeum dan pelatihan administrasi keuangan sederhana telah dilakukan oleh kelompok perempuan keluarga miskin dalam program pemberdayaan perempuan keluarga miskin namun masih terdapat suatu kelemahan yaitu kurangnya dukungan pemerintah desa. Di mana mereka yang seharusnya sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya pemberdayaan terhadap perempuan keluarga miskin ternyata belum sepenuhnya mendukung dalam kegiatan pemberdayaan perempuan keluarga miskin yang berada di wilayah kerjanya. Karena dukungan dari pemerintah desa yang masih kurang terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin tersebut, akhirnya peneliti dan tim kerja masyarakat bersepakat untuk membuat sebuah perencanaan melalui advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin, agar program tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah desa.

Dari hasil review tersebut, peneliti dan tim kerja masyarakat membuat (2) Rencana model

advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Perencanaan advokasi program ini dilakukan melalui *FGD*. Perencanaan advokasi program dibuat berdasarkan hasil dari kebutuhan dan permasalahan serta harapan dari anggota kelompok perempuan keluarga miskin dengan tetap mengacu kepada konsep-konsep advokasi pekerja sosial. Dari hasil *FGD* dengan kelompok dan tim kerja masyarakat tersebut diperoleh hasil bahwa untuk memperoleh dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dapat dilakukan dengan advokasi program melalui forum audiensi dan *public hearing*. Tujuan diadakannya audiensi dan *public hearing* tersebut yaitu mensosialisasikan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin sekaligus berharap agar program pemberdayaan perempuan keluarga miskin mendapatkan dukungan.

Dari rencana advokasi program yang telah disepakati bersama peneliti dan tim kerja masyarakat, kemudian dilakukan (3) Implementasi advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Implementasi dari perencanaan program tersebut dilakukan melalui kegiatan audiensi dan *public hearing* yang dilakukan di aula Desa Cimenyan. Sebelum pelaksanaan kegiatan audiensi dan *public hearing*, peneliti bersama tim kerja masyarakat melakukan koordinasi dengan pihak Pkpu selaku sponsor, media massa lokal “noong” dan STKS sebagai upaya untuk memperoleh dukungan yang dapat memperkuat penyelenggaraan kegiatan audiensi dan *public hearing* tersebut. Kegiatan audiensi dan *public hearing* ini bertujuan antara lain, a) mensosialisasikan program pemberdayaan perempuan keluarga miskin kepada pihak pemerintah desa, lembaga desa dan para tokoh masyarakat b) agar program tersebut mendapatkan pengakuan dan dukungan oleh pemerintah desa, c) agar kelompok perempuan keluarga miskin mendapatkan pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang membuat ibu-ibu kreatif dan

meningkatkan kesejahteraan mereka, d) agar program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dapat dijadikan model dalam pemberdayaan kelompok lainnya di Desa Cimenyan. Kegiatan audiensi dan *public hearing* dilakukan pada Hari Jum,at tanggal 7 April pukul 13.00 WIB di aula Desa Cimenyan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh hampir seluruh lembaga desa dan pihak pemerintah desanya. Dari seluruh rundown acara dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Setelah kegiatan audiensi dan *public hearing* dilaksanakan, peneliti dan tim kerja masyarakat melakukan kegiatan lobbying dengan kepala desa, lembaga desa seperti BPD, LKMD, MUI, BUMDES, BKM dan PKK untuk memperkuat mendapatkan dukungan mereka. Disamping itu dengan melibatkan pemerintah desa, tim kerja masyarakat dan PKPU menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin. Hasil yang diperoleh dari implementasi advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin yaitu adanya dukungan pemerintah Desa Cimenyan terhadap program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dengan diterbitkannya SK tentang program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui kelompok usaha masyarakat mandiri dan Surat Izin Usaha kelompok, adanya dukungan dari PKK desa, serta adanya pelatihan kewirausahaan, branding dan marketing serta berbagai bantuan dana bagi kelompok dari sponsor. Hal itu membuktikan bahwa program pemberdayaan perempuan keluarga miskin sangat bermanfaat bagi perempuan keluarga miskin keluar dari masalahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tahap akhir dari penelitian ini adalah (4) Penyempurnaan model program pemberdayaan perempuan keluarga miskin di Desa Cimenyan. Rangkaian kegiatan penelitian yang dimulai dari review model

awal, dilanjutkan perencanaan program, dan kemudian dimplementasikannya advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin melalui kegiatan audiensi dan *public hearing*, *lobbying* dan pelibatan media massa yang menghasilkan dukungan dari sponsor maupun pemerintah merupakan penyempurnaan model program pemberdayaan perempuan

keluarga miskin yang telah dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang disempurnakan dalam penelitian ini adalah model awal ditambah dengan Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat, dan adanya dukungan PKPU sebagai sponsor serta dilengkapi dengan dukungan dari pemerintah desa.

## Daftar Pustaka

- Abu Huraerah. 2007. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Adi Fahrudin. 2016. *Kumpulan Makalah, Naskah Terakhir Advokasi*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 04/01/32/Th.XVIII (2016). *Tingkat Kemiskinan Jawa Barat*. Bandung: Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Jabar.
- Biro Pusat Statistik. 2013. *Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2013*, <http://www.bps.go.id/releases/file/kemiskinan>. diakses Agustus 2016.
- Edi Suharto. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Edi Suharto. 2011. *Kebijakan Sosial, Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Harry Hikmat. 2013. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Press.
- Isbandi Rukminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ife, Jim, Frank Tesoriero. 2008. Terj. *Community Development, Alterlantif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lester, Lori. 2008. *Advokasi Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Pustaka Societa.
- Midgley, James. 2005. *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Ditperda Islam Depag R.I.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Netting, F. Ellen. 2004. *Social Work Macro Practice (3<sup>rd</sup> Edition)*. Boston: Allyn and Bacon.
- Schneider, L R & Lester, Lori. 2010. *Advokasi Pekerjaan Sosial, Sebuah Kerangka untuk Bergerak (Terjemahan)*. Bandung: STKS.
- Sugiyono .2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta/
- Sunyoto Usman. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja
- Suwarsih Madya. 2009. *Penelitian Tindakan, Action Research*. Bandung: Alfabeta.

- S.Suradi. Advokasi sosial dalam pemberdayaan fakir miskin: [e-journal.kemosos.go.id/ndex.php/sosioinforma/article/viewfile/494](http://e-journal.kemosos.go.id/ndex.php/sosioinforma/article/viewfile/494).
- T. Zulyadi. 2014 Advokasi Sosial. Pusat Jurnal UIN Ar Raniry: [journal.ar-raniry.ac.id/ndex.php/bayan/article/download/124/113](http://journal.ar-raniry.ac.id/ndex.php/bayan/article/download/124/113)